

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Jabatan Fungsional Untuk Mendorong Pencapaian Kinerja Yang Optimal
(Analisis YuridisPenerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Profesi Dosen di IAIN Salatiga)

Abstrak

Diyah Rochati, SE. 2016. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Jabatan Fungsional Untuk Mendorong Pencapaian Kinerja Yang Optimal (Analisis YuridisPenerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Profesi Dosen di IAIN Salatiga). Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.Pembimbing I: Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H., Pembimbing II: Dr.Hj. Widayati, S.H., M.H.

Berbagai macam persoalan maupun hambatan yang membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini tidak serta merta dapat berjalan dengan baik harus ditata ulang maupun diperbaharui secara total. Oleh karenanya, reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membangun sumber daya aparatur negara agar lebih berkualitas dan berdaya guna. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pada tahap awal, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan disiplin aparatur negara atau pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah PP 53 tahun 2010 dapat diterapkan secara tepat untuk mengukur disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan jabatan fungsional dosen di IAIN Salatiga sehingga dapat memberikan dorongan pada pencapaian kinerja. Dalam tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal ini, studi dokumen dan studi lapangan dilakukan dalam rangka pengambilan data tentang implementasi kebijakan disiplin dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Data lapangan diperoleh dengan melaksanakan beberapa metode, seperti pengamatan langsung serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti para dosen dan pengelola di bagian kepegawaian. Penelitian ini menemukan bahwa profesi dosen PNS tidak sama dengan ASN lainnya di mana dosen terikat pula dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengharuskan dosen untuk melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dengan demikian PP Nomor 53 Tahun 2010 memerlukan perlakuan tersendiri agar dapat diterapkan secara optimal di lingkungan jabatan fungsional dosen.

The Implementation of Civil Servants Discipline Policy in Lecturer Functional-Position to Optimize Work Achievement

(Legal Analysis on the Implementation of Government Regulation No. 53 Th. 2010 concerning Civil Servants Discipline toward Lecturer Profession in IAIN Salatiga)

Abstract

DiyahRochati, SE. 2016. The Implementation of Civil Servants Discipline Policy in Lecturer Functional-Position to Optimize Work Achievement (Legal Analysis on the Implementation of Government Regulation No. 53 Th. 2010 concerning Civil Servants Discipline toward Lecturer Profession in IAIN Salatiga). Magister Program of Legal Studies, Universitas Islam Sultan Agung. 1st Advisor: Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H., 2nd Advisor: Dr.Hj. Widayati, S.H., M.H.

Several problems and obstacles that create a system of governance today does not run properly must be reorganized and refurbished totally. Therefore, bureaucratic reforms were carried out in order to realize some good governance and to build the resources of the state apparatus to be more qualified and efficient. To achieve this, improvement of the state apparatus (employee) discipline must be prioritized at first. This study aimed to investigate whether The Regulation of The Government of Indonesia No. 53, Th. 2010 can be applied accurately to measure the discipline of the civil servants, especially in the functional position as lecturer in IAIN Salatiga, so as to give a boost to the achievement of the work performance. In this type of qualitative research with a socio-legal approach, the study of documents and field studies were carried out in the context of collecting data which are the implementation of the policy ruling the discipline of the lecturers in IAIN Salatiga. The field data were obtained by carrying out a number of methods, such as direct (participant) observation and some interviews with several competent parties such as lecturers and staffs in the human resources (employee) division. The research found that the profession as state-employee-lecturers is not similar with other state employees where lecturers are also bound with Tri Dharma (Three Dedication) of higher education: education, research, and community development. At this point, The Government Regulation No. 53, Th. 2010 must be implemented with some special treatment to be optimally applicable for the state-employee-lecturers.